Deteksi Ilusi Fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi (Pengujian Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah dalam Merespon Dana Perimbangan)

Adi Bhakti
Fakultas Ekonomi Universitas Jambi

Abstract. Penelitian bertujuan untuk: (1). Menganalisis perkembangan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi; (2) Menganalisis dan mengidentifikasi fenomena ilusi fiskal yang terjadi dalam keuangan kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Penelitian menggunakan data panel kabupaten/kota di Provinsi Jambi dalam rentang waktu tahun 2001 – 2012. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan regresi data panel. Variabel-variabel yang digunakan adalah belanja daerah, PDRB, Pajak Daerah, Herfindahl Concentration Taxes (HCT), Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil.

Hasil penelitian mendapatkan: (1) Meskipun tingkat ketergantungan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama periode Tahun 2007 – 2011 sudah mulai menunjukan tetapi tingkat ketergantunnya masih terkagoteri tinggi: (2) PDRB, DAU, dan DBH memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan pengeluaran pemerintah. Sedangkan pajak daerah (TAX) memiliki hubungan yang negatif dan signifikan secara statistik. Hasil penelitian tersebut menunjukkan terjadi ilusi fiskal setelah diberlakukannya otonomi daerah. Karena terdapat variabel pendapatan yang memiliki korelasi negatif dengan pengeluaran pemerintah, dengan nilai yang signifikan; (3) Terdapatnya fenomena ilusi fiskal di dalam kinerja anggaran pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jambi, disebabkan karena tingginya ketergantungan daerah transfer pemerintah pusat. Dengan kata lain, meskipun pajak daerah turun, pemerintah daerah tetap menganggarkan belanja daerah lebih besar dari tahun sebelumnya, karena harapan untuk mendapatkan dana transfer dari pusat tersebut.

Keywords: Ilusi Fiskal, Dana Perimbangan, Data Panel, Belanja Daerah

PENDAHULUAN

Tingginya tingkat ketergantungan belanja daerah terhadap pendanaan dana perimbangan, menunjukkan tingginya ketergantungan keuangan daerah terhadap pendanaan pemerintah pusat. Nagathan dan Sivagnanam (1999) dalam Handayani, 2009), menjelaskan bahwa alokasi dana transfer di negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia pada umumnya lebih didasarkan pada aspek pengeluaran pemerintah daerah, dan kurang memperhatikan kemampuan pengumpulan potensi keuangan lokal. Akibatnya dari tahun ke tahun pemerintah daerah akan selalu menuntut dana transfer yang kebih besar lagi dari pusat dan menyampingkan usaha eksplorasi basis keuangan lokal sebagai sumber pandapatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Setiaji dan Adi (2007) menunjukkan bahwa tingkat kemandirian daerah dalam era otonomi justru mengalami penurunan. Pemerintah daerah justru semakin menggantungkan diri pada DAU daripada mengupayakan peningkatan Penerimaan Asli Daerah (PAD). Alderete (dalam Priyo, 2006) menegaskan bahwa ketika pemerintah pusat memberikan bantuan melalui transfer (dalam bentuk dana perimbangan) kepada daerah untuk meningkatkan belanja daerah, muncul

spekulasi bahwa pengeluaran pemerintah daerah merespon perubahan transfer itu secara asimetris. Perilaku asimetris ini dapat dilihat dengan adanya pengeluaran yang berasal dari bantuan *(grants)* yang memberikan keuntungan pada pemerintah daerah, sedangkan di lain pihak anggaran juga berkurang.

Fenomena semacam ini oleh Dollery dan Worthington (1999) dan Priyo (2009) diindikasikan sebagai ilusi fiskal *(fiscal illusion).* Logikanya, setiap penerimaan pemerintah harus berdampak terhadap besaran pengeluaran dan pada gilirannya semakin besar pengeluaran pemerintah maka pemerintah seharusnya mendapat manfaat dengan meningkatnya penerimaan pemerintah di masa mendatang, misal meningkatnya kontribusi pajak masyarakat. Artinya terdapat hubungan yang simetris antara sisi penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Apabila kenyataan yang terjadi sebaliknya (terjadi hubungan yang asimetris) maka dapat dikatakan terjadi ilusi fiskal, dikarenakan pemerintah pusat ataupun masyarakat bahwa mereka memberikan kontribusi (baik dana transfer maupun pajak/retribusi daerah) yang lebih besar dari yang sebenarnya dibutuhkan oleh pemerintah daerah.

Fenomena tingginya tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap pendanaan pemerintah pusat juga terlihat di Provinsi Jambi. Pada Tahun 2012 kontribusi dana perimbangan terhadap penerimaan daerah mencapai 69,08 persen sedangkan dari Pendapatan Asli Daerah hanya 30,92 persen.

Hal ini mengindikasikan adanya perilaku menyimpang pemerintah daerah terhadap transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat yang diperkirakan mempengaruhi upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Meskipun demikian, indikasi tersebut memerlukan pengujian dan pembuktian empiris dan hal tersebut menjadi dasar pemikiran yang melatarbelakangi penelitian ini.

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis perkembangan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi; (2) Menganalisis dan mengidentifikasi fenomena ilusi fiskal yang terjadi dalam keuangan kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Adapun manfaat penelitian adalah untuk: (1) dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan mengenai hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah dan referensi bagi penelitian selanjutnya yang terkait dengan keuangan daerah; (2) bantuan untuk perumusan kebijakan yang terkait dengan kebijakan dana transfer pemerintah pusat kepada daerah khususnya untuk kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

METODE PENELITIAN

Data yang Digunakan

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan dari kabupaten/kota di Provinsi Jambi yang meliputi data Belanja Daerah, PDRB, pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan. Data dikumpulkan selama periode tahun 2007 sampai 2011.

Analisis Data

Untuk menganalisis perkembangan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan kabupaten/kota di Provinsi dilakukan secara deskriptif dengan memanfaatkan ukuran-ukuran perkembangan dan rasio yang relevan.

Untuk mendeteksi fenomena ilusi fiskal dilakukan melalui pendekatan pendapatan (revenue enchancement). Pendekatan pendapatan mengasumsikan bahwa belanja daerah berhubungan positif dengan penerimaan daerah, karena belanja daerah pada dasarnya merupakan fungsi dari penerimaan daerah. Pertambahan besarnya komponen penerimaan seharusnya

mempunyai hubungan positif dengan belanja, namun bila terjadi hal yang sebaliknya maka diindikasikan terjadi ilusi fiskal.

Berdasarkan hal tersebut dibangun model regresi data panel sebagai berikut:

$$\ln BD_i t=\beta_0+\beta_1 \ln PDRB_{it-1}+\beta_2 \ln TAX_i t_{-1}+ \beta_3 \ln HCT_i t_{-1}+\beta_4 \ln DAU_i t_{-1} + \beta_5 \ln DBH_i t_{-1} + \mu_{it}$$

Dimana,

BD = Belanja daerah
PDRB= PDRB
TAX = Pajak daerah
RET = Herfindahl Concentration Taxes (HCT), yang diproksi dari rasio retribusi daerah terhadap total penerimaan retribusi provinsi
DAU = Dana Alokasi Umum
DBH = Dana Bagi Hasil
i = kabupaten/kota ke i
t = tahun ke t

Berdasarkan variasi-variasi asumsi yang dibentuk, maka terdapat tiga pendekatan dalam perhitungan model regresi data panel yaitu:

1. Metode Common-Constant (The Pooled OLS Method=PLS)
2. Metode Fixed Effect (FEM)
3. Metode Random Effect (REM)

Dari ketiga model tersebut akan ditentukan model yang paling tepat untuk mengestimasi parameter regresi data panel. Secara formal terdapat tiga pengujian yang digunakan

Pemilihan Model PLS dengan FEM

Untuk mengetahui apakah model FEM lebih baik dibandingkan model PLS dapat dilakukan dengan melihat signifikansi model FEM dilakukan dengan uji statistik F. Pengujian ini dikenal juga dengan istilah Uji Chow atau Likelihood Test Ratio.

Pemilihan Model FEM dengan REM

Untuk mengetahui apakah model fixed effect lebih baik dari model random effect, digunakan uji Hausman.

Pemilihan antara PLS dengan REM

Untuk mengetahui apakah model REM lebih baik dibandingkan model PLS, dapat digunakan uji Lagrange Multiplier (LM) yang dikembangkan oleh Bruesch-Pagan. Pengujian ini didasarkan pada nilai residual dari model PLS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Penerimaan Daerah

Dukungan penerimaan daerah dalam pelaksanaan pembangunan pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi relatif menggembirakan. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa selama periode Tahun 2007–2011, rata-rata pertumbuhan penerimaan 15,49 persen pertahun.

Tabel 1. Perkembangan Penerimaan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Periode Tahun 2007-2011 (juta rupiah).

Kabupaten/Kota	Tahun		Pert. (%/th)
	2007	2011	
Kerinci	482,331	930,108	23.21
Merangin	397,905	600,377	12.72
Sarolangun	366,352	616,896	17.10
Batanghari	393,870	588,745	12.37
Muaro Jambi	407,842	631,235	13.69
Tanjabtim	384,856	623,174	15.48
Tanjabbar	408,098	654,238	15.08
Tebo	374,232	604,967	15.41
Bungo	430,531	685,040	14.78
Kota Jambi	477,701	766,321	15.10
Rata-rata	412,372	670,110	15.49

Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah)

Pada Tahun 2011 Kabupaten Kerinci (data gabungan dengan Kota Sungai Penuh) merupakan daerah dengan realisasi penerimaan terbesar dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jambi. Kondisi ini relatif sama dengan keadaan Tahun 2007 dimana Kabupaten Kerinci, dikuti oleh Kota Jambi dan Kabupaten Bungo. Sebaliknya, daerah dengan penerimaan terendah pada Tahun 2011 adalah Kabupaten Batanghari. Kondisi sedikit berbeda dengan Tahun 2007, dimana daerah dengan penerimaan terendah adalah Kabupaten Sarolangun.

Perkembangan penerimaan daerah tertinggi selama periode tersebut dialami

oleh Kabupaten Kerinci yaitu sebesar 23,21 persen pertahun. Hal ini terutama disebabkan adanya pemekaran Kabupaten Kerinci menjadi Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh (dalam analisis ini data kedua daerah tersebut digabung). Daerah yang juga mengalami pertumbuhan penerimaan yang tinggi (di atas rata-rata) yaitu Kabupaten Sarolangun. Tingginya pertumbuhan penerimaan daerah Kabupaten Sarolangun menyebabkan meningkatnya peringkat daerah ini dari daerah dengan penerimaan terendah pada Tahun 2007 menjadi peringkat keenam terbesar, di atas Kabupaten Kabupaten Tebo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Kerinci.

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan besaran PAD dapat dilihat bahwa, baik pada Tahun 2007 maupun 2011, Kota Jambi menempati peringkat pertama sebagai daerah dengan PAD terbesar. Besarnya PAD Kota Jambi karena daerah ini merupakan ibukota provinsi dengan tingkat aktivitas perdagangan terbesar di Provinsi Jambi. Sebaliknya, daerah dengan realisasi penerimaan PAD terkecil pada tahun 2011 adalah Kabupaten Tanjabtim

Tabel 2. Perkembangan PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2007-2011 (juta rupiah)

Kabupaten/Kota	Tahun		Pert. (%/th)
	2007	2011	
Kerinci	21,482	36,422	17.39
Merangin	17,923	35,396	24.37
Sarolangun	9,003	21,330	34.23
Batanghari	20,847	27,409	7.87
Muaro Jambi	8,418	21,621	39.21
Tanjabtim	10,124	18,064	19.60
Tanjabbar	14,259	24,262	17.54
Tebo	16,165	19,809	5.64
Bungo	37,593	51,918	9.53
Kota Jambi	37,999	68,355	19.97
Rata-Rata	19,381	32,458	19.53

Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah)

Selama tahun 2007-2011 perkembangan terbesar realisasi penerimaan yang bersumber dari PAD ternyata di dapat oleh Kabupaten Muaro Jambi. Sebaliknya Kabupaten Tebo merupakan daerah dengan perkembangan PAD terendah.

Kontribusi PAD terhadap Penerimaan Daerah

Rata-rata kontribusi PAD terhadap penerimaan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2011 adalah 5,06 persen. Jika dibandingkan dengan kondisi pada Tahun 2007, kontribusi ini sudah relatif meningkat dari 4,59 persen. Seiring meningkatnya PAD, diharapkan tingkat kemandirian daerah semakin meningkat dan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat akan semakin kecil.

Tabel 3. Kontribusi PAD Terhadap Penerimaan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Periode Tahun 2007-2011

Kabupaten / Kota	Kontribusi (%)		Rerata Kontribusi
	2007	2011	
Kerinci	4.45	6.74	5.10
Merangin	4.50	5.90	5.40
Sarolangun	2.46	3.46	3.12
Batanghari	5.29	4.66	4.32
Muaro Jambi	2.06	3.43	2.82
Tanjabtim	2.63	2.90	3.11
Tanjabbar	3.49	3.71	3.60
Tebo	4.32	3.27	3.67
Bungo	8.73	7.58	8.76
Kota Jambi	7.95	8.92	8.90
	4.59	5.06	

Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah)

Selanjutnya jika dilihat rata-rata kontribusi PAD terhadap penerimaan daerah selama periode Tahun 2007 – 2011 menunjukkan bahwa Kota Jambi merupakan daerah dengan kontribusi PAD terbesar yaitu sebesar 8,90 persen. Sebaliknya Kabupaten Muaro Jambi merupakan daerah dengan kontribusi PAD terkecil yaitu hanya 2,82 persen.

Perkembangan Dana Perimbangan

Rata-rata dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota di Provinsi Jambi pada Tahun 2011 adalah sebesar Rp 557,7 milyar. Jumlah ini meningkat dibandingkan pada Tahun 2007 yang sebesar Rp 384,0 milyar, atau mengalami pertumbuhaan 11,31 persen pertahun.

Tabel 4. Perkembangan Penerimaan Dana Perimbangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Periode Tahun 2007-2011 (juta rupiah)

Kabupaten/ Kota	Tahun		Pert. (%/tahun)
	2007	2011	
Kerinci	448,849	782,256	18.57
Merangin	369,356	564,982	13.24
Sarolangun	357,349	508,803	10.60
Batanghari	373,023	507,915	9.04
Muaro Jambi	370,780	522,285	10.22
Tanjabtim	363,994	557,618	13.30
Tanjabbar	380,840	564,552	12.06
Tebo	358,068	466,118	7.54
Bungo	392,938	521,214	8.16
Kota Jambi	424,515	581,023	9.22
Rata-rata	383,971	557,677	11.31

Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah)

Baik pada Tahun 2007 maupun 2011, Kabupaten Kerinci menjadi daerah dengan penerimaan dana perimbangan yang terbesar. Sebaliknya, daerah penerima dana perimbangan terendah pada Tahun 2011 adalah Kabupaten Tebo dan pada Tahun 2007 adalah Kabupaten Sarolangun.

Dari sisi pertumbuhannya, terlihat bahwa Kabupaten Kerinci menempati pertumbuhan dana perimbangan tertinggi. Sebaliknya daerah dengan tingkat pertumbuhan dana perimbangan terendah adalah Kabupaten Tebo.

Kontribusi Dana Perimbangan terhadap Penerimaan Daerah

Rata-rata kontribusi dana perimbangan tehadap total penerimaan daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi pada Tahun 2011 adalah sebesar 83,22 persen. Tingginya kontribusi dana perimbangan ini menunjukkan tingginya tingkat ketergantungan kabupaten/kota di Provinsi Jambi terhadap pemerintah pusat.

Meskipun demikian, selama periode 2007 – 2011 terlihat kecenderungan penurunan tingkat ketergantungan ini. Pada Tahun 2007, rata-rata kontribusi dana perimbangan terhadap total penerimaan daerah adalah sebesar 93,11 persen.

Tabel 5. Kontribusi Dana Perimbangan Terhadap Penerimaan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Periode Tahun 2007-2011

Kabupaten / Kota	Kontribusi (%)		Rerata Kontribusi
	2007	2011	
Kerinci	93.06	84.10	86.35
Merangin	92.83	94.10	90.33
Sarolangun	97.54	82.48	88.02
Batanghari	94.71	86.27	88.87
Muaro Jambi	90.91	82.74	86.50
Tanjabtim	94.58	89.48	87.34
Tanjabbar	93.32	86.29	89.64
Tebo	95.68	77.05	84.56
Bungo	91.27	76.09	79.94
Kota Jambi	88.87	75.82	82.86
Rata-rata	93.11	83.22	

Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah)

Secara rata-rata selama periode tahun 2007-2011 Kabupaten Merangin merupakan daerah dengan kontribusi dana perimbangan terhadap penerimaan daerah terbesar. Sebaliknya Kabupaten Bungo sebagai daerah dengan kontribusi dana perimbangan terendah.

Perkembangan Belanja Daerah

Secara rata-rata, belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi pada Tahun 2011 adalah sebesar Rp 725,6 milyar. Dibandingkan dengan keadaan Tahun 2007, terjadi pertumbuhan 17,02 persen pertahun, dimana pada tahun tersebut, rata-rata belanja daerah adalah sebesar Rp 431,7 milyar.

Dilihat secara terperinci antar daerah, selama periode Tahun 2007 – 2011, pertumbuhan tertinggi dari belanja daerah ini dialami oleh Kabupaten Sarolangun

yang mencapai 28,63 persen pertahun. Sebaliknya pada periode yang sama, pertumbuhan belanja daerah yang terendah dialami oleh Kabupaten Batanghari yaitu sebesar 9,29 persen.

Tabel 6. Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Periode Tahun 2007-2011

Kabupaten / Kota	Belanja Daerah (Rp ribu)		Pert. (%/tahun)
	2007	2011	
Kerinci	520,104	1,095,781	27.67
Merangin	374,627	603,226	15.26
Sarolangun	291,292	624,837	28.63
Batanghari	429,291	588,791	9.29
Muaro Jambi	420,910	658,726	14.13
Tanjabtim	478,108	782,457	15.91
Tanjabbar	560,426	850,858	12.96
Tebo	374,232	593,222	14.63
Bungo	356,266	660,642	21.36
Kota Jambi	512,161	797,797	13.94
Rata-rata	431,742	725,634	17.02

Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah)

Deteksi Ilusi Fiskal

Estimasi Model

Hasil estimasi dengan menggunakan metode PLS diberikan berikut:

Tabel 7. Hasil Estimasi Metode PLS

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Stat.	Prob.
C	4.154	2.432	1.708	0.0968
LOG(PDRB?(-1))	0.163	0.057	2.867	0.0071
LOG(TAX?(-1))	-0.100	0.043	-2.338	0.0254
LOG(DAU?(-1))	0.620	0.120	5.148	0.0000
LOG(DBH?(-1))	0.167	0.039	4.242	0.0002
LOG(HCT?(-1))	0.055	0.047	1.181	0.2459
R-squared	0.669	Mean dep.var		20.227
Adj.R-squared	0.620	S.D. dep. var		0.164
S.E. of regression	0.101	AIC		-1.609
Sum squared resid	0.347	SC		-1.356
Log likelihood	38.180	HC.		-1.517
F-statistic	13.740	DW stat		1.831
Prob(F-statistic)	0.000			

Hasil analisis menunjukkan bahwa secara simultan (uji F) menunjukkan bahwa model reresi dapat digunakan untuk memprediksi belanja daerah (p-value < 5%). Angka Adjusted R-squared sebesar 0,62026 menunjukkan 62,03 persen belanja daerah dapat dijelasakan oleh PDRB, pajak (TAX), dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil (DBH) dan Herfindahl Concentration Taxes (HCT).

Secara parsial (uji t), variabel yang berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah (dengan p-value < 5%) adalah PDRB, TAX, DAU dan DBH. Sedangkan HCT tidak menunjukkan pengaruh signifikan (p-value > 5%).

Selanjutnya hasil estimasi dengan model FEM diberikan sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil Estimasi Metode FEM

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Stat.	Prob.
C	-3.964	6.294	-0.630	0.5346
LOG(PDRB?(-1))	1.167	0.555	2.104	0.0456
LOG(TAX?(-1))	-0.207	0.108	-1.919	0.0665
LOG(DAU?(-1))	0.437	0.219	1.997	0.0568
LOG(DBH?(-1))	0.119	0.093	1.287	0.2100
LOG(HCT?(-1))	0.053	0.054	0.968	0.3424
Fixed Effects (Cross)				
_KERINCI--C	-0.014			
_MERANGIN--C	0.240			
_SAROLANGUN--C	0.250			
_BATANGHARI--C	0.147			
_MAJAMBI--C	0.222			
_TANJABTIM--C	-0.600			
_TANJABBAR--C	-0.391			
_TEBO--C	0.449			
_BUNGO--C	0.288			
_KJAMBI--C	-0.590			
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.779	Mean dep. var		20.227
Adj. R-squared	0.655	S.D. dep. var		0.164
S.E. of regression	0.096	AIC		-1.564
Sum squared resid	0.232	SC		-0.929
Log likelihood	46.249	HC		-1.333
F-statistic	6.289	DW stat		2.297535
Prob(F-statistic)	0.000			

Hasil analisis menunjukkan bahwa secara simultan (uji F) menunjukkan bahwa model reresi dapat digunakan untuk memprediksi belanja daerah (p-value < 5%). Angka Adjusted R-squared sebesar 0,654993 menunjukkan 65,49 persen belanja daerah dapat dijelaskan oleh PDRB, pajak (TAX), dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil (DBH) dan Herfindahl Concentration Taxes (HCT).

Secara parsial (uji t), variabel yang berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah (dengan p-value < 5%) hanyalah PDRB sedangkan , TAX, DAU, DBH, dan HCT tidak menunjukkan pengaruh signifikan (p-value > %).

Selanjutnya, estimasi dengan metode REM diberikan sebagai berikut:

Tabel 9. Hasil Estimasi Metode REM

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Stat.	Prob.
C	4.030	2.561	1.573	0.125
LOG(PDRB?(-1))	0.160	0.067	2.399	0.022
LOG(TAX?(-1))	-0.097	0.047	-2.085	0.045
LOG(DAU?(-1))	0.619	0.129	4.794	0.000
LOG(DBH?(-1))	0.176	0.041	4.329	0.001
LOG(HCT?(-1))	0.058	0.048	1.219	0.231
Random Effects (Cross)				
_KERINCI--C	0.008			
_MERANGIN--C	-0.014			
_SAROLANGUN--C	0.020			
_BATANGHARI--C	-0.030			
_MAJAMBI--C	-0.004			
_TANJABTIM--C	-0.003			
_TANJABBAR--C	0.006			
_TEBO--C	-0.001			
_BUNGO--C	0.034			
_KJAMBI--C	-0.015			

Effects Specification	S.D.	Rho
Cross-section random	0.038	0.136
Idiosyncratic random	0.096	0.864

Weighted Statistics			
R-squared	0.650	Mean dep.var	15.850
Adjusted R-squared	0.599	S.D. dep.var	0.153
S.E. of regression	0.0967	SSR	0.318
F-statistic	12.645	DWstat	2.023
Prob(F-statistic)	0.000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.668	Mean dep.var	20.227
Sum squared resid	0.348	DW stat	1.847

Hasil analisis menunjukkan bahwa secara simultan (uji F) menunjukkan bahwa model reresi dapat digunakan untuk memprediksi belanja daerah (p-value < 5%). Angka Adjusted R-squared sebesar 0,598876 menunjukkan 59,89 persen belanja daerah dapat dijelasakan oleh PDRB, pajak (TAX), dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil (DBH) dan Herfindahl Concentration Taxes (HCT).

Secara parsial (uji t), variabel-variabel yang berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah (dengan p-value < 5%) adalah PDRB, TAX, DAU dan DBH. Sebaliknya HCT tidak menunjukkan pengaruh signifikan (p-value > 5%).

Pemilihan Model

Uji Chow

Uji Chow untuk memilih antara model PLS dan FEM diberikan sebagai berikut:

Redundant Fixed Effects Tests
Pool: ILUSI
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.380	(9,25)	0.249
Cross-section Chi-square	16.136	9	0.064

Output Eviews tersebut menunjukkan baik F test maupun chi-square tidak signifikan (p-value lebih besar dari 5%), sehingga Ho diterima, maka model PLS lebih baik dibandingkan model FEM

Uji Hausman

Uji Hausman untuk memilih antara model FEM dan REM diberikan sebagai berikut:

Correlated Random Effects - Hausman Test
Pool: ILUSI
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	5.241411	5	0.3871

Output uji dari Eviews tersebut memperlihatkan bahwa statistik Chi-Square memiliki p-value > 0,05, sehingga Ho diterima, maka model REM lebih baik dibandingkan model FEM.

Uji Breusch-Pagan LM

Dengan menggunakan residual dari metode PLS didapatkan nilai LM sebagai sebesar 0,116732. Nilai distribusi chi-square dengan dengan derajat bebas 1 pada $\alpha = 5\%$ adalah sebesar 3,84146. Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa LM < chi-square, sehingga dapat disimpulkan model PLS lebih baik dibandingkan model REM.

Interpretasi Estimasi dan Pengujian Model

Berdasarkan pengujian-pengujian model, model yang paling valid adalah model PLS. Mengacu pada hal tersebut, dapat diberikan ringkasan hasil estimasi PLS dari Tabel sebagai berikut:

Tabel 10. Deteksi Ilusi Fiskal

Variabel	Koe-fisien	Prob	Kete-rangan	Kesim-pulan
C	4.154	0.097		
LOG(PDRB?(-1))	0.163	0.007	Signifi-kan	Tidak terjadi ilusi fiskal
LOG(TAX?(-1))	-0.099	0.025	Signifi-kan	Terjadi ilusi fiskal
LOG(DAU?(-1))	0.620	0.000	Signifi-kan	Tidak terjadi ilusi fiskal
LOG(DBH?(-1))	0.167	0.000	Signifi-kan	Tidak terjadi ilusi fiskal
LOG(HCT?(-1))	0.055	0.246	Tidak Signifi-kan	Tidak terjadi ilusi fiskal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB, DAU, dan DBH memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan pengeluaran pemerintah. Sedangkan pajak daerah (TAX) memiliki hubungan yang negatif dan signifikan secara statistik. Hasil penelitian tersebut menunjukkan terjadi ilusi fiskal setelah diberlakukannya otonomi daerah.

Terdapatnya fenomena ilusi fiskal di dalam kinerja anggaran pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jambi yang ditunjukkan oleh pengaruh negatif signifikan antara pajak daerah dan belanja daerah, disebabkan karena tingginya ketergantungan daerah transfer pemerintah pusat. Dengan kata lain, meskipun pajak daerah turun, pemerintah daerah tetap menganggarkan belanja daerah lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, karena harapan/ketergantungan untuk mendapat-kan dana transfer dari pusat tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Meskipun tingkat ketergantungan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama periode Tahun 2007 – 2011 sudah mulai menunjukan tetapi tingkat ketergantunganya masih terkagoteri tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh besarnya kotribusi dana perimbangan terhadap penerimaan daerah yang pada Tahun 2011 mencapai 83,22 persen.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB, DAU, dan DBH memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan pengeluaran pemerintah. Sedangkan pajak daerah (TAX) memiliki hubungan yang negatif dan signifikan secara statistik. Hasil

penelitian tersebut menunjukkan terjadi ilusi fiskal setelah diberlakukannya otonomi daerah. Karena terdapat variabel pendapatan yang memiliki korelasi negatif dengan pengeluaran pemerintah, dengan nilai yang signifikan.

3. Terdapatnya fenomena ilusi fiskal di dalam kinerja anggaran pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jambi yang ditunjukkan oleh pengaruh negatif signifikan antara pajak daerah dan belanja daerah, disebabkan karena tingginya ketergantungan daerah transfer pemerintah pusat. Dengan kata lain, meskipun pajak daerah turun, pemerintah daerah tetap menganggarkan belanja daerah lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, karena harapan/ketergantungan untuk mendapatkan dana transfer dari pusat tersebut.

Saran

1. Pentingnya bagi daerah dalam meningkatkan kemampuan keuangannya antara lain melalui optimalisasi penerimaan daerah dari pajak melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak daerah.

3. Pemerintah daerah agar dapat mengalokasikan dana perimbangan yang diterima pada sektor-sektor pembangunan agar penggunaannya menjadi efisien dan menjadi pajak daerah.

4. Pemerintah pusat perlu menyusun dan merancang sistem dan kebijakan pengawasan terhadap penggunaan dana perimbangan yang diberikan kepada daerah. agar dana perimbangan tepat sasaran dan guna, sehingga pelaksanaan otonomi daerah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DAFTAR PUSTAKA

Handayani, A. 2009. Analisis Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Pengeluaran Daerah dan Upaya Pajak *(Tax Efort)* Daerah (Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). *Skripsi Tidak Dipublikasikan,* Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Diponegoro Semarang.

Kuncoro M. 2004. *Otonomi & Pembangunan Daerah,* Erlangga, Jakarta

Maimunah. M. 2006. Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera.*Paper disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi IX Padang.*

Nagathan, dan KJ Sivagnanan. 1999. Federal Transfer and Tax Effort of States in India.*Indian Economic Journal.*

Priyo Hari Adi. 2006. Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota Se Jawa- Bali).*Paper disajikan pada Simposium Nasional*

Priyo H.A. 2009. Fenomena Ilusi Fiskal Dalam Kinerja Anggaran Pemerintah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan,* Vol.6, No.1.

Wulan L dan Priyo Hari Adi. 2008. Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah Terhadap Transfer Pemrintah Pusat.*The 2nd National Conference UKWMS.* Surabaya.

Setiaji W dan Adi P.H, 2007, Peta Kemampuan Keuangan Daerah Sesudah Otonomi Daerah : Apakah Mengalami Pergeseran? (Studi Pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali).*Paper disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi X,* Universitas Hasanuddin, Makassar.